

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 07 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PSDKP
4. KEGIATAN : 2355 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP		339.904.757,0
01.01	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP	33,5	
01.02	Persentase pelaksanaan pengelolaan data Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP	100	
01.03	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	
01.04	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	
01.05	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)	80	
01.06	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	
01.07	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP	100	
01.08	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	12	
01.09	Persentase pelaksanaan pengelolaan data IP ASN lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP	78	
01.11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	78	
01.12	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	83	
01.13	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP	80,5	
01.14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP	90	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01.15	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP	100	
01.16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	
01.17	Jumlah inovasi yang dihasilkan	1	
01.18	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP	<0,5	
01.19	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP	3	
01.20	Persentase pelaksanaan pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100	
01.21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP	77,5	
01.22	Persentase pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100	
01.23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP	77,5	
01.24	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP	92	
01.25	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	75	
01.26	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasanunit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	
01.27	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	90	
01.28	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP	88	
01.29	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	100	
Total			339.904.757,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP										339.904.757,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										1.850.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								000 - Bukan Tematik		1.850.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi										1.850.000,0
		Pusat	Pusat								545.900,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								100.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								70.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								100.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								95.600,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								78.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								67.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								93.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								100.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										299.154.757,0
01.EBA.956	Layanan BMN								000 - Bukan Tematik		1.830.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pengelolaan BMN										104.540,0
		Pusat	Pusat								104.540,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan BMN										1.311.960,0
		Pusat	Pusat								717.432,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								57.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								21.400,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								33.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								21.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								25.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								27.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								45.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								30.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								33.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								50.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								43.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								69.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								80.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								58.328,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN										413.500,0
		Pusat	Pusat								413.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum								000 - Bukan Tematik		850.000,0
	051 - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan										384.689,0
		Pusat	Pusat								384.689,0
	052 - Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan										162.261,0
		Pusat	Pusat								162.261,0
	053 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										303.050,0
		Pusat	Pusat								303.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								000 - Bukan Tematik		5.200.000,0
	051 - Perencanaan Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama										53.100,0
		Pusat	Pusat								12.450,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								350,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.100,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								3.100,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								3.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								3.100,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								3.100,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								3.100,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								3.100,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								3.100,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.100,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								3.100,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								3.100,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								3.100,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										3.104.466,0
		Pusat	Pusat								2.477.990,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								36.976,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								43.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								49.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								43.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								49.500,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								43.500,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								43.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								49.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								43.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								43.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								43.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								49.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								43.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								43.500,0
	053 - Pelaksanaan Kerjasama										1.820.434,0
		Pusat	Pusat								1.820.434,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	054 - Evaluasi Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama										222.000,0
		Pusat	Pusat								222.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Penataan Organisasi dan Tata Kelola										920.000,0
		Pusat	Pusat								504.552,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								17.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								10.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								10.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								34.400,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								72.420,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								10.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								50.200,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								14.200,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								56.200,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								25.300,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								16.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								40.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								49.728,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		14.120.000,0
	051 - Layanan umum rumah tangga										2.188.271,0
		Pusat	Pusat								2.188.271,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan										8.801.629,0
		Pusat	Pusat								815.715,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								29.572,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								528.294,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								29.572,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								450.607,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								29.572,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								29.572,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								29.572,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								33.480,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								29.572,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								29.572,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								29.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								33.912,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								396.344,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								27.532,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								379.428,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								36.152,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								29.572,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								294.300,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								29.735,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								29.572,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								29.572,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								29.572,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								537.580,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								34.342,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								29.572,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								540.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								29.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								394.874,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								32.692,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								30.560,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								29.572,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								29.572,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								481.636,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								479.146,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								566.900,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								28.812,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								30.132,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								29.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								535.800,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								794.160,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								29.572,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								29.572,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								29.572,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								579.768,0
	053 - Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa										484.000,0
		Pusat	Pusat								484.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	054 - Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan										2.646.100,0
		Pusat	Pusat								2.646.100,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		1.300.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan data dan informasi										22.000,0
		Pusat	Pusat								22.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pengelolaan Data Pengawasan SDKP										1.106.508,0
		Pusat	Pusat								674.280,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								17.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								22.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								25.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								25.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								27.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								30.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								32.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								30.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								21.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								38.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								35.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								32.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								48.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								49.728,0
	053 - Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP										121.492,0
		Pusat	Pusat								121.492,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								000 - Bukan Tematik		450.000,0
	051 - Persiapan Bantuan Hukum										54.450,0
		Pusat	Pusat								54.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Bantuan Hukum										366.350,0
		Pusat	Pusat								366.350,0
	053 - Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum										29.200,0
		Pusat	Pusat								29.200,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		274.404.757,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										194.404.757,0
		Pusat	Pusat								73.855.886,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								6.972.810,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								9.646.364,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								12.047.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								11.885.091,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								10.389.829,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.866.537,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								5.986.361,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								10.097.527,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								4.883.739,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.033.534,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								13.431.841,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								5.616.438,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								10.947.846,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								5.743.704,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										80.000.000,0
		Pusat	Pusat								18.660.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.065.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.345.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								6.970.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								6.630.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								4.375.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								4.375.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.705.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								5.475.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								3.385.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.145.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								5.780.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.800.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								6.240.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.050.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										8.420.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		6.500.000,0
	051 - Pengadaan kendaraan bermotor										2.903.790,0
		Pusat	Pusat								2.500.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								149.950,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								78.840,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								175.000,0
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										3.596.210,0
		Pusat	Pusat								1.938.262,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								64.848,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								350.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								75.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								125.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								75.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								75.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								118.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								97.100,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								304.300,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								200.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								173.200,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		1.920.000,0
	051 - Pengadaan prasarana perkantoran										1.920.000,0
		Pusat	Pusat								1.920.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										13.800.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM								000 - Bukan Tematik		5.450.000,0
	051 - Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai										1.964.942,0
		Pusat	Pusat								1.941.992,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								22.950,0
	052 - Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai										344.121,0
		Pusat	Pusat								303.871,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								40.250,0
	053 - Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional										3.140.937,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								893.137,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								170.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								61.800,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								150.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								150.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								145.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								150.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								180.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								200.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								266.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								150.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								150.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								170.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								155.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								150.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								003 - Anggaran Responsif Gender		8.350.000,0
	051 - Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										10.057,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								10.057,0
	052 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										8.317.433,0
		Pusat	Pusat								8.317.433,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP										22.510,0
		Pusat	Pusat								22.510,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										16.680.000,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran								003 - Anggaran Responsif Gender		5.050.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran										70.000,0
		Pusat	Pusat								70.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran										4.060.600,0
		Pusat	Pusat								2.391.196,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								5.120,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								22.500,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								6.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								13.200,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								26.900,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								13.182,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								15.600,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								21.900,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								70.640,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								20.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								66.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								16.800,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								16.200,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								14.700,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								13.200,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								11.700,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								16.200,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								56.500,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								15.600,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								16.942,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								21.300,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								24.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								105.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								79.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								24.300,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								19.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								21.000,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								31.800,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								98.900,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								151.500,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								17.700,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								47.800,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								15.750,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								23.700,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								73.900,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								35.100,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								111.200,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								15.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								30.300,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								9.300,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								13.070,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								23.700,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								14.300,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								59.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								34.800,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								22.350,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								17.400,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								69.750,0
	053 - Fasilitas Revisi Anggaran										203.400,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								800,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.600,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	054 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum										516.000,0
		Pusat	Pusat								516.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	055 - Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		2.050.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										46.375,0
		Pusat	Pusat								46.375,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										1.887.705,0
		Pusat	Pusat								148.534,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								17.880,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								60.750,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								16.680,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								80.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								14.480,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								14.080,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								13.080,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								9.972,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								13.280,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								13.080,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								12.390,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								11.640,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								79.150,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								10.440,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								75.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								5.400,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								12.080,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								112.500,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								17.335,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								13.680,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								9.480,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								15.080,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								30.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								12.960,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								19.080,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								42.494,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								14.080,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								80.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								11.760,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								12.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								17.480,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								14.880,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								89.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								19.280,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								95.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								102.750,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								19.480,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								16.280,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								18.040,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								19.080,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								20.800,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								24.480,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								88.850,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								142.750,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								23.480,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								26.480,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								26.680,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								124.300,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										115.920,0
		Pusat	Pusat								115.920,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								000 - Bukan Tematik		4.780.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan Keuangan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan										4.620.460,0
		Pusat	Pusat								2.717.130,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								13.160,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								41.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								16.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								24.800,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								32.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								21.200,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								28.000,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								36.400,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								62.030,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								34.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								37.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								29.600,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								28.800,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								26.800,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								24.800,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								20.800,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								28.800,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								43.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								28.600,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								30.050,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								35.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								39.200,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								82.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								55.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								39.600,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								33.200,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								35.200,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								49.600,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								68.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								78.000,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								30.800,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								48.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								31.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								38.800,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								60.000,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								54.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								95.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								27.200,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								47.600,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								19.600,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								24.620,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								38.800,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								28.800,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								45.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								53.600,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								39.670,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								30.400,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								66.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan										109.540,0
		Pusat	Pusat								109.540,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								000 - Bukan Tematik		4.800.000,0
	051 - Perencanaan Reformasi Kinerja										29.545,0
		Pusat	Pusat								29.545,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP										1.687.467,0
		Pusat	Pusat								1.444.765,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								35.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								15.250,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								15.600,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								10.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								11.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								44.202,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								12.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								22.650,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								15.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								14.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								16.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								22.000,0
	053 - Pengelolaan Kinerja Pegawai										145.475,0
		Pusat	Pusat								145.475,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
	054 - Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										2.643.516,0
		Pusat	Pusat								711.379,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								121.460,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								135.643,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								182.008,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								80.122,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								126.450,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								76.250,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								78.250,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								161.176,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								80.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								159.766,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								117.050,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								233.650,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								195.976,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								183.736,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja										293.997,0
		Pusat	Pusat								293.997,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0